

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendahuluan

Bab tiga ini akan membahas tentang metodologi yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Dalam penulisan sebuah tesis, esensi tesis ini terletak pada penelitian, karenanya metode penelitian menjadi sangat penting. Terutama dalam penulisan tesis program magister diperlukan metodologi yang memenuhi standard akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian menurut Sarantakos (1993) sebagaimana dikutip Poerwandari adalah metodologi secara literal berarti ilmu tentang metode-metode, berisi standar dan prinsip yang digunakan sebagai pedoman penelitian. Dan metode tersebut dapat menjelaskan sesuatu tentang cara yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan bukti-bukti empiris.³⁸ Ini artinya sebuah penelitian akademik memerlukan kaidah tertentu yang mampu menggali data dan informasi yang obyektif. Data lapangan seringkali tersembunyi dan tidak sekaligus dapat digali hanya dengan sekali pertemuan. Karenanya diperlukan metode penggalian data yang fleksibel dan variatif. Dan pernyataan Poerwandari tersebut di atas menjadi penting terutama untuk menggali data yang sifatnya sosiologis yang memerlukan pendekatan kualitatif.

Selanjutnya, ada beberapa prinsip penelitian yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu pendekatan dan perspektif penelitian; lokasi penelitian; subjek penelitian; metode pengumpulan data; instrumen penelitian; teknik analisa data; prosedur penelitian; dan isu etis serta sistematika penulisan. Kesemua aspek dalam melaksanakan penelitian di atas dijabarkan dalam beberapa sub-bab berikut ini:

³⁸ Poerwandari, E. Kristi. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi UI, 2007. 17.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap realita yang ingin diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan karena menurut Staruss dan Corbin “metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena, baik yang sedikitpun belum diketahui maupun yang baru sedikit diketahui”.³⁹ Dalam konteks tesis ini, pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap mengapa tidak banyak pemerintah kabupaten/kota yang merespons dan menindaklanjuti kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT. Dengan menggunakan pendekatan ini juga diharapkan dapat mempelajari dan memahami kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat dicarikan jalan keluar yang lebih baik.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh, penelitian ini menggunakan studi dokumen terhadap penelitian-penelitian mengenai pemulihan korban KDRT yang dilakukan di tingkat pusat dan daerah, terutama respons pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota terhadap kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT. Di samping itu untuk mendapatkan gambaran terinci, penelitian ini juga melakukan kajian kontekstual, yaitu melakukan wawancara langsung dan tidak langsung terhadap aparat dari instansi yang bertanggung jawab terhadap pemulihan korban KDRT di Kabupaten Bekasi, termasuk petugas yang ditunjuk sebagai pemberi layanan terhadap korban. Dan agar penelitian ini lebih objektif dilakukan pula wawancara terhadap perempuan korban KDRT. Pada akhirnya, objektivitas pelaksanaan eksplorasi, deskripsi dan interpretasi dalam tesis ini dapat dilihat dan dibuktikan melalui data-data dan informasi yang diperoleh, termasuk pengalaman perempuan yang menjadi ciri khas kajian-kajian perempuan.

³⁹ Strauss, Anselm & Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data*. Diterjemahkan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2007. 5.

3.3. Perspektif Penelitian

Penelitian ini dilakukan selain menggunakan pendekatan kualitatif, juga menggunakan perspektif perempuan. Perspektif perempuan sebagaimana dikatakan oleh Saptari & Holzner merupakan studi atau kajian yang fokus perhatiannya tentang perempuan, baik itu mengenai sejarah, pengalaman, atau apapun tentang perempuan dalam konteks pencerahan dan pemberdayaan perempuan.⁴⁰ Penelitian ini mempelajari kedalaman perspektif pemerintah kabupaten/kota dalam merespons dan menindaklanjuti kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Tujuan dari penelitian yang berperspektif perempuan selain untuk memperoleh pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi posisi perempuan yang tidak menguntungkan, juga mencari strategi dan upaya agar dapat mengubah situasi perempuan ke arah yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu mencari tahu mengapa Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak merespons dan menindaklanjuti kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT. Melakukan kajian terhadap hal ini perlu dilakukan untuk mengungkap dan menemukan upaya agar Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi responsif, sehingga perempuan korban KDRT dapat berkurang jumlahnya dan segera mendapatkan upaya pemulihan.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bekasi. terdapat beberapa alasan pemilihan lokasi. *Pertama*, alasan geografis sebagaimana dijelaskan dalam bab pendahuluan, letak geografis Kabupaten Bekasi berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, tempat kebijakan nasional diproses. Sebagai salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan, asumsi hal ini adalah memudahkan untuk mengakses informasi kebijakan nasional secara langsung baik dengan staf pemerintah langsung dan/atau melalui sosialisasi kebijakan yang acap kali dilaksanakan di kabupaten/kota terdekat.

Namun kenyataannya, kebijakan nasional pemulihan KDRT belum

⁴⁰ Saptari, Ratna. & Holzner, Brigitte. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta. Kalyanamitra, 1997. 45.

maksimal dilaksanakan di Kabupaten Bekasi. Alasan *kedua*, karena Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari daerah metropolitan JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) yang mempunyai dinamika kehidupan masyarakat urban. Masyarakat urban ini secara sosiologis mempunyai kehidupan bukan pertanian, banyak perempuan yang terlibat dalam kehidupan publik. Kecuali kehidupan urban memerlukan biaya tinggi yang memerlukan kontribusi ekonomis perempuan, juga secara kultural perempuan sudah diterima keterlibatannya dalam area publik. Pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat urban membawa konsekuensi ketidaksiapan laki-laki untuk menerima peran publik perempuan yang pada akhirnya memicu tingginya kekerasan terhadap perempuan. Hal ini diperparah dengan kehidupan masyarakat urban yang tingkat kriminalitasnya tinggi, menyebabkan perempuan menjadi sasaran korban kekerasan. Alasan *ketiga*, jumlah kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT cukup tinggi. Sementara Pemerintah Kabupaten Bekasi belum memprogramkan kegiatan pemulihan korban KDRT dalam program kerja daerah tahun 2008. Padahal untuk menjadi bagian dari program kerja daerah dengan alokasi dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), memerlukan proses panjang dan rumit. Karena pengalokasian ini baru dapat dilakukan jika dimasukkan ke dalam salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disetujui oleh Badan Perencana Daerah (BAPEDA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan ketiga alasan tersebut di atas, Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai lokasi penelitian dan studi kasus. Studi kasus dalam tesis ini dimaksudkan sebagai sebuah metode penelitian fenomena sebagaimana dikutip oleh Shulamit Reinharz (1992) yang diterjemahkan oleh *Women Research Indonesia* merumuskan studi kasus sebagai:

suatu metode penelitian fenomena sosial lewat analisis menyeluruh terhadap satu kasus individual. Kasus itu mungkin berupa seorang pribadi, kelompok, satu episode, satu komunitas, satu masyarakat atau unit kehidupan sosial lainnya..., pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa kasus yang diteliti bersifat khas untuk kasus-kasus jenis tertentu sehingga lewat analisis mendalam bisa dibuat generalisasi yang akan bisa diterapkan untuk kasus-kasus lain dari jenis yang sama.⁴¹

Dalam konteks tesis ini sesuai dengan rumusan di atas, kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal memprogramkan upaya pemulihan bagi korban KDRT kemungkinan juga dihadapi daerah kabupaten/kota lainnya. Untuk itu, upaya-upaya yang nantinya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pemulihan korban KDRT, dapat dijadikan inspirasi bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk melakukan hal yang sama.

3.5. Subjek Penelitian

Terdapat tiga kategori subjek penelitian dalam tesis ini. Kategori *Pertama*, staf instansi penyelenggara pemulihan korban KDRT berdasarkan PP No. 4/2006 yang mengacu kepada penanda tangan Kesepakatan Bersama Tiga Menteri dan KAPOLRI (KATMAGATRIPOL, 2002). Instansi penyelenggara kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota tidak jauh berbeda. Kalaupun terdapat perbedaan, hal tersebut didasarkan pada kebijakan dan otonomi masing-masing daerah. Matriks di bawah ini akan memudahkan pemahaman mengenai subjek penelitian:

⁴¹ Reinharz, Shulamit. *Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial*. Diterjemahkan oleh Lisabona Rahman dan J. Bambang Agung. Jakarta: Penerbit Women Research Institute, 2005. 225.

Matriks 3.5.1.B
Subjek Penelitian

Kategori Pertama	<p>Staf Instansi Penyelenggara Pemulihan Korban KDRT (Kabupaten Bekasi):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kasubbid.Pemberdayaan Perempuan Pemkab b. Kasubbid. Kesga Dinas Kesehatan c. Kasubbid Yanmedik dan Koord. UGD RSD Kab. Bekasi d. Staf BPM (Permintaan wawancara dengan Kabid. Gulsos, tidak direspons). e. Kepala UPPA Polres Bekasi
Kategori Kedua	Staf Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI
Kategori Ketiga	Korban KDRT

Matriks 3.5.1.B di atas menunjukkan bahwa kategori *pertama* adalah staf pada instansi yang seharusnya menjadi penyelenggara pemulihan korban KDRT di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan UU No. 23/2004 dan PP No. 4/2006, pemulihan korban KDRT ditangani secara bersama dan terpadu oleh pemerintah dan instansi terkait. Di tingkat pusat telah disepakati sejak tahun 2002 pemulihan korban KDRT di lakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, POLRI dan Departemen Sosial sebagai pemberi layanan (medis, hukum dan psikososial), (lihat Bab 4). Sementara itu, instansi penyelenggara pemulihan korban KDRT di tingkat kabupaten/kota mengikuti instansi di tingkat pusat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 PP No.4/2006 bahwa:

Ayat (1): Penyelenggara pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Ayat (2): Fasilitas penyelenggaraan meliputi ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian, tenaga yang ahli dan profesional, pusat pelayanan dan rumah aman serta sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.⁴²

⁴² Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama*

Demikian pula instansi penyelenggara pemulihan korban KDRT di Kabupaten Bekasi, juga mengacu pada kebijakan tersebut di atas. Terdapat kendala di lapangan antara lain, Kabupaten Bekasi tidak memiliki Dinas Sosial, sementara fungsi sosial dijalankan oleh Bidang Penanggulangan Sosial yang berada di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pemkab. Demikian pula dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga juga berada di bawah BPM, tidak berbentuk Dinas. Juga kurangnya antusiasme dari staf instansi terkait dalam proses wawancara. Wawancara hanya dilakukan terhadap Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan, padahal permintaan wawancara ditujukan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Kesejahteraan Keluarga (KK) dengan harapan dapat menggali lebih dalam informasi dan data yang berkaitan dengan beberapa kebijakan dan program kerja bidang tersebut terhadap upaya pemulihan korban KDRT. Demikian pula dengan permintaan melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Penanggulangan Sosial tidak dipenuhi.

Terkait dengan kendala di atas, karena informasi serta data yang diperoleh dirasa belum cukup, maka dilakukan penambahan subjek wawancara sehingga dilakukan wawancara tidak langsung terhadap staf lainnya di instansi yang sama. Hal ini dapat dibenarkan sesuai dengan pernyataan Sarantakos (1993) sebagaimana dikutip Poerwandari bahwa:

Prosedur penentuan subjek dan/atau sumber data dalam penelitian kualitatif menampilkan tiga karakteristik, *pertama*, diarahkan tidak pada jumlah sampel yang besar, melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian. *Kedua*, tidak ditentukan secara kaku sejak awal tetapi dapat berubah dalam jumlah maupun karakteristik sampelnya, sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian, dan *ketiga*, tidak diarahkan pada keterwakilan dalam arti jumlah atau peristiwa acak, melainkan pada kecocokan konteks.⁴³

Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Perempuan KPP., 2008. 37.

⁴³ Poerwandari, *op. cit.*, hal. 110.

Kategori *kedua*, staf Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). Hal ini penting dilakukan untuk melihat konsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat dan pelaksanaannya di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya kategori *ketiga* adalah korban KDRT. Hal ini juga penting dilakukan untuk melihat adakah para korban mendapatkan pemulihan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, masyarakat atau lembaga sosial lainnya. *Cross check* data dan informasi dari kategori pertama dilakukan terhadap kategori kedua dan ketiga.

3.6. Instrumen Penelitian

Untuk menunjang proses penelitian ini, digunakan instrumen penelitian, yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara mendalam dilakukan terhadap subjek dari instansi penyelenggara pemulihan korban KDRT, staf KPP dan perempuan korban KDRT. Sedangkan wawancara tak langsung dilakukan kepada staf lainnya di lingkup Pemkab Bekasi agar dapat memberikan data yang belum terungkap dari subjek sebelumnya. Pedoman wawancara ini berbeda antara subjek dari instansi penyelenggara pemulihan, staf KPP dan korban KDRT. Hal ini dilakukan karena menyesuaikan data yang telah diperoleh sebelumnya.

Selain panduan wawancara tersebut, juga digunakan *tape recorder* untuk merekam proses wawancara yang terjadi. Rekaman tersebut selain untuk mempermudah dalam pengutipan kalimat langsung dari informan, juga mempermudah melakukan pembuatan narasi kasus. Penelitian ini juga menggunakan buku catatan dan alat tulis yang digunakan dalam proses wawancara dan observasi. Kedua alat tersebut sangat berguna untuk menuliskan hal-hal yang terlihat dalam proses observasi situasi dan kondisi yang terjadi pada saat proses wawancara dilakukan.

3.7. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai metode, yaitu wawancara secara mendalam dan informal, observasi dan studi dokumen. Wawancara mendalam adalah percakapan atau tanya jawab terhadap suatu isu secara detil dan mendalam tanpa memaksa dengan tetap menjaga kerahasiaan.

Sementara wawancara informal adalah wawancara yang dilakukan tidak dalam suasana formal dan bukan terhadap informan utama. Sedangkan observasi adalah melihat, mengamati dan memperhatikan suatu keadaan/subjek yang diteliti, yang kemudian dituliskan/digambarkan untuk memperjelas sesuatu yang sedang diteliti tersebut. Dan yang dimaksud dengan studi dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen berupa kebijakan tentang pemulihan korban KDRT, undang-undang dan turunan undang-undang tersebut. Dan di dalam setiap metode yang digunakan, diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

Untuk memudahkan pemahaman, matriks di bawah ini akan memperlihatkan dari mana sumber-sumber data diperoleh, bagaimana data tersebut diperoleh dan data/informasi apa yang dikumpulkan:

Matriks 3.7.2.B
Metode Pengumpulan Data

Sumber data	Metode	Data/informasi Yang digali
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KK Pemkab Bekasi	Wawancara & Observasi	Implementasi kebijakan pemulihan korban KDRT (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 & Permen PP No. 01/VI/2007,)
Dinas Kesehatan Kab. Bekasi	Wawancara	Implementasi kebijakan, sda
Rumah Sakit Daerah Kab. Bekasi	Wawancara & Observasi	a. Implementasi kebijakan, sda b. Data korban KDRT berdasarkan <i>VeR</i>
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bekasi	Wawancara & Observasi	a. Implementasi kebijakan, sda b. Data korban KDRT yang melapor
Bidang Perlindungan Perempuan KPP	Wawancara & Studi dokumen	Pembuatan & sosialisasi kebijakan, sda
Korban KDRT	Wawancara & Observasi	pengalaman: kekerasan yang dialami, upaya penanganannya, dll

Matriks 3.7.2.B di atas menunjukkan beberapa metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu melalui wawancara, observasi dan studi dokumen untuk masing-masing sumber data. Penjelasan secara detil mengenai wawancara, observasi dan studi dokumen seperti dijelaskan di bawah ini, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan, dialog dan/atau tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Banister, dkk (1994) sebagaimana dikutip Poerwandari mengatakan bahwa wawancara kualitatif dapat dilakukan bila peneliti bermaksud memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain, kecuali pendekatan kualitatif.⁴⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan melalui wawancara mendalam dan wawancara tidak langsung. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara agar dapat menggali informasi dan/atau pengalaman subjek secara mendalam dan utuh.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data. Hal ini dinyatakan oleh Patton (1990) sebagaimana dikutip Poerwandari bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data esensial terutama dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan observasi tersebut diharapkan dapat memperoleh data yang detil, akurat dan berguna bagi peneliti.⁴⁵

Hal senada juga dinyatakan oleh Banister, dkk (1994) sebagaimana dikutip oleh Poerwandari bahwa observasi merupakan metode yang mengarah pada kegiatan mengamati secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan memperhatikan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.⁴⁶ Observasi merupakan kegiatan yang selain dilakukan untuk mendapatkan data secara detil, akurat dan banyak, juga merupakan kegiatan yang dapat mendekatkan (hubungan personal) antara peneliti dengan subjek atau fenomena penelitian.

Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi dengan tujuan untuk melihat secara mendalam proses pemberian layanan medik terhadap korban KDRT, termasuk tempat dalam

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 146.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 135.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 134.

memberikan pelayanan tersebut. Observasi juga dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bekasi dengan tujuan, selain melihat proses layanan hukum yang diberikan oleh petugas, juga melihat situasi dan kondisi ruangan dalam menerima korban. Kegiatan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, selain untuk tujuan di atas, juga untuk menghindari adanya data yang belum dikumpulkan, terlewatkan atau tidak dapat digambarkan dalam wawancara.

c. Studi Dokumen

Selain wawancara dan observasi, studi dokumen juga merupakan salah satu metode pengumpulan data, dan merupakan studi terhadap berbagai tulisan atau catatan yang berisikan informasi, data, bukti atau kenyataan yang telah atau sedang terjadi. Tulisan-tulisan atau catatan tersebut akan menjadi sumber data bagi seorang peneliti dalam penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari laporan hasil penelitian, jurnal, majalah, booklet dan internet. Termasuk pula produk hukum berupa undang-undang, dan kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan topik ini, yang diterbitkan baik secara nasional maupun daerah.

3.8. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis gabungan antara induktif dan deduktif. Di mana telah dilakukan penggabungan antara pertanyaan penelitian, teori, pustaka, penelitian terdahulu dan data yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan pernyataan Poerwandari bahwa teknik analisis induktif-deduktif yang mengembangkan kategori-kategori analisis berdasarkan gabungan dari pertanyaan penelitian, teori, penelitian terdahulu dan data. Hal ini akan memperoleh kekayaan fenomena yang dapat dipotret dan ditampilkan secara utuh dan menyeluruh.⁴⁷

Selanjutnya analisa data dilakukan setelah melakukan studi dokumen, wawancara dan observasi, tahapan analisa kritis dimulai terhadap respons

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 197.

Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melakukan pemulihan korban KDRT. Pengolahan data-data tersebut melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:

- a. Hasil wawancara dibuatkan transkrip secara verbatim (secara kata demi kata atau secara harfiah). Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengutipan secara langsung dari subjek penelitian. Terdapat kendala dalam pembuatan transkrip secara verbatim, karena sebagian besar subjek penelitian (staf instansi penyelenggara pemulihan korban KDRT adalah pegawai negeri di instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi) dan korban KDRT tidak bersedia direkam. Namun begitu, pedoman wawancara dan buku catatan sangat membantu pada saat proses wawancara berlangsung dengan menuliskan secara manual jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan, termasuk percakapan lain yang dianggap penting.
- b. Berdasarkan transkrip tersebut, data dipilih dan dipilah sesuai dengan isu-isu besar yang menonjol dan sama dari beberapa subjek penelitian.
- c. Setelah menemukan isu besar yang sama, maka dilakukan kategorisasi terhadap isu dan subjek penelitian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam mengklasifikasikan data secara detail.
- d. Selanjutnya dari kategori tersebut, ditemukan tema-tema, baik tema besar maupun tema-tema kecil.
- e. Terakhir, penulisan hasil penelitian dilakukan berdasarkan analisa tema yang muncul dari kategori data yang ada sebagai laporan hasil penelitian.

3.9. Prosedur Penelitian

Proses pelaksanaan penelitian di lapangan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pengumpulan berbagai data tentang kekerasan terhadap perempuan dan upaya pemulihan korban, baik berupa kebijakan-kebijakan nasional dan daerah Kabupaten Bekasi, penelitian sebelumnya, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Semua data tersebut diperoleh dari LBH APIK Jakarta, Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Yayasan Jurnal Perempuan, Kajian Wanita UI, Kantor Pemkab Bekasi dan situs website. Setelah seluruh data terkumpul, pemilahan data dilakukan berdasarkan

kebutuhan. Karena tesis ini difokuskan kepada upaya pemulihan korban KDRT, maka data-data tersebut di atas dimaksudkan juga khusus tentang pemulihan korban KDRT. Di samping juga melihat beberapa daerah tingkat kabupaten/kota yang telah melakukan upaya pemulihan korban KDRT.

- b. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan penentuan subjek penelitian, yaitu staf dari instansi penyelenggara pemulihan korban KDRT di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Bidang PP dan Bidang Gulsos Pemkab, Dinas Kesehatan-Rumah Sakit Daerah dan UPPA Polres Bekasi); Staf KPP RI dan korban KDRT. Satu nama korban KDRT diperoleh pada saat melakukan wawancara dengan Kanit UPPA Polres Bekasi. Satu nama korban lainnya diperoleh dari staf P2TP2A DKI Jakarta, dan dua korban lainnya merupakan kenalan penulis ini.
- c. Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu penulis meminta surat pengantar dari Kajian Wanita UI untuk dapat melakukan wawancara terhadap subjek yang telah ditentukan. Hal ini merupakan prosedur yang harus dijalani untuk melakukan penelitian di kantor pemerintahan daerah.
- d. Selanjutnya, dalam penelitian ini untuk mendapatkan data esensial penulis membangun dan membina hubungan dengan subjek penelitian, yaitu staf Bidang Pemberdayaan Perempuan, BPM, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, dan UPPA Polres Bekasi, yang kesemuanya berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi. Penulis berkunjung ke kantor para responden lebih dari satu kali, yaitu pada saat menyerahkan surat permintaan data dan wawancara, mengecek surat untuk mengetahui apakah sudah di *follow up* dan membuat janji wawancara. Wawancara pun dilakukan lebih dari satu kali. Penulis juga melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap beberapa kegiatan sosialisasi UU PKDRT yang dilakukan oleh Bidang PP dan KK Pemkab Bekasi, beberapa hari *stand by* di RSD Kab. Bekasi dan UPPA Polres Bekasi untuk melihat kemungkinan adanya kasus yang sedang ditangani. Dalam observasi tersebut Penulis bertemu langsung dan melakukan wawancara dengan salah seorang korban KDRT yang perkaranya sedang ditangani di UPPA Polres Bekasi. Sementara itu, tidak ditemukan kasus yang sedang ditangani RSD Kab. Bekasi karena

beberapa kasus yang sudah masuk, kebanyakan berbentuk penganiayaan yang tidak dijelaskan secara detail klasifikasi penganiayaan; KDRT atau bukan. Membangun dan membina hubungan juga dilakukan terhadap staf KPP RI dan keempat korban KDRT dan yang menjadi subjek penelitian ini.

- e. Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, penulis mulai melakukan pengolahan data, sebagaimana metode pengolahan data yang dipilih dan jalankan dalam proses penelitian ini.
- f. Penulisan tesis dilakukan setelah semua tahapan dari pengumpulan hingga pengolahan data dilalui sebagaimana di sebutkan di atas.

3.10. Isu Etis

Penelitian ini mempertimbangkan isu etis, karena akan mengungkap informasi dari aparat (pemerintah daerah, kepolisian dan rumah sakit), dan pengalaman korban KDRT. Dalam pengungkapan informasi dan pengalaman tersebut, tentu ada informasi atau temuan data yang apabila ditampilkan apa adanya, dikhawatirkan akan menimbulkan salah pengertian (*misunderstanding*) dari pihak-pihak yang mungkin terkait di dalamnya. Misalnya, nama informan/subjek penelitian dan nama-nama yang terkait langsung dengan informan tersebut. Hal ini menurut Palys (1992) sebagaimana dikutip Poerwandari dalam sebuah penelitian, seorang peneliti memiliki dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab kemanusiaan; peneliti harus memiliki komitmen yang kuat dalam penelitiannya untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman sebaik mungkin sebagai tanggung jawab ilmiah. Sedangkan tanggung jawab kemanusiaan merupakan suatu keharusan untuk berhati-hati agar tidak menimbulkan ketersinggungan atau ketidaknyamanan pada informan/subjek penelitian, di samping juga menghindari timbulnya konflik baru dan tergangguya wilayah pribadi informan/subjek penelitian.⁴⁸ Berdasarkan pendapat tersebut, di dalam penelitian ini menggunakan nama samaran sebagai pengganti nama, agar terhindar dari masalah atau konflik, namun tetap ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 228-229.

3.11. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca, penulisan dalam tesis ini terdiri dari tujuh bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka dan kerangka pikir, metodologi penelitian, upaya pemulihan korban KDRT, realitas kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bekasi, Respons Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap pemulihan korban KDRT dan terakhir, tesis ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Bab Satu, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian. *Bab Dua*, mendiskusikan tentang tinjauan pustaka, yaitu tentang tiga penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan topik penelitian ini. Juga kerangka pikir dibuat untuk mengerangkakan (*to frame*) ketiga penelitian tersebut ke dalam teori-teori atau konsep yang digunakan dalam melakukan analisis. Selanjutnya dalam *Bab Tiga*, membahas tentang bagaimana penelitian ini dilakukan yang terangkum dalam metodologi penelitian, yaitu tentang pendekatan penelitian, perspektif penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, prosedur penelitian, isu etis dan sistematika penulisan.

Mulai Bab Empat sampai Bab Enam merupakan analisa hasil temuan penelitian lapangan dan data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan topik dalam tesis ini. Dalam *Bab Empat*, mendiskusikan tentang pemulihan korban KDRT. Bab ini merupakan studi dokumen yang terdiri dari lima sub bab yaitu Pendahuluan, Kebijakan Nasional Pemulihan Korban KDRT, Mekanisme Penanganan Korban KDRT, Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT di Daerah dan Kesimpulan. Dalam sub bab pertama, di dalam pendahuluan dipaparkan sekilas tentang proses pemulihan termasuk data jumlah pengada layanan yang terdapat di Indonesia, dan isi dari sub bab-sub bab yang akan dibahas. Pada sub bab dua mendiskusikan tentang kebijakan nasional yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pemulihan korban KDRT. Terdapat empat kebijakan nasional terkait dengan pemulihan korban KDRT yang seharusnya direspons dan ditindaklanjuti di semua tingkatan pemerintahan. Sub bab ketiga mendiskusikan tentang mekanisme penanganan korban KDRT

di semua tingkatan pemerintahan melalui instansi penyelenggara pemulihan korban berdasarkan PP No. 4/2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT. Belum banyak pemerintah kabupaten/kota yang merespons dan menindaklanjuti PP No. 4/2006, hal ini dapat dilihat dalam sub bab keempat yang mendiskusikan tentang penyelenggaraan pemulihan korban KDRT di tingkat kabupaten/kota. Bab ini ditutup dengan kesimpulan bab.

Dalam *Bab Lima*, mendiskusikan tentang realitas kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bekasi. Bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu pendahuluan, kekerasan terhadap perempuan (KTP), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemulihan korban KDRT di Kabupaten Bekasi, dan kesimpulan. Dalam sub bab pertama, di dalam pendahuluan dipaparkan sekilas tentang sub bab-sub bab yang akan dibahas dalam bab lima tersebut. Pada sub bab dua mendiskusikan tentang realitas kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bekasi. Jumlah kasus KTP yang tercatat di dua instansi (Polres dan RSD) sangat mengejutkan dengan angka diatas seratus dalam kurun dua tahun (2006-2007). Demikian pula dalam sub bab ketiga, khusus tentang jumlah kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang dilaporkan ke UPPA Polres Bekasi, dan kasus yang dilihat dari *Visum et Repertum (VeR)* yang dibuat oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan tipologi kekerasan yang dialami korban, kuat dugaan bahwa kekerasan terhadap perempuan tersebut merupakan KDRT; korban adalah ibu rumah tangga, perlukaan di bagian wajah dan tubuh, dilakukan dengan menggunakan tangan kosong dan lokus kejadian terjadi di dalam rumah korban. Dalam sub bab keempat juga mendiskusikan dan menganalisa tentang upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melakukan upaya pemulihan terhadap korban KDRT. Di mana terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi atau lembaga sosial lainnya tidak melakukan upaya apapun terhadap mereka, kecuali pelaporan mereka (dua kasus) diterima dan diproses di Polres Bekasi. Dua kasus lainnya tidak melapor. Dan bab ini ditutup dengan kesimpulan bab.

Bab Enam membahas dan menganalisa tentang respons Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap upaya pemulihan korban KDRT. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu pendahuluan yang menjelaskan tentang indikator respons, yaitu

tingkat respons aparat penyelenggara pemulihan terhadap KDRT dan pemulihannya serta respons Pemkab Bekasi terhadap kebijakan nasional pemulihan korban KDRT. Sub bab kedua menjelaskan secara detail tingkat respons yang dilihat dari instansi penyelenggara pemulihan korban KDRT dalam lingkup Kabupaten Bekasi; Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KK, BPM (mewakili Bidang Penanggulangan Sosial), Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah serta UUPA Polres Bekasi. Penyebab rendahnya respons pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bekasi terhadap upaya pemulihan korban kekerasan/KDRT, dapat dilihat dalam sub bab ketiga. Dan sub bab keempat tentang kesimpulan bab.

Bab Tujuh, terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dalam bab ini merupakan rangkuman dari kesimpulan dalam sub bab yang terdapat dalam bab-bab dalam tesis ini. Sementara itu, tesis ini memberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, terutama untuk melakukan pemantauan terhadap sosialisasi dan implementasi kebijakan yang dikeluarkan. Rekomendasi juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk respons positif pemerintah daerah terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu upaya pemulihan terhadap korban KDRT.

3.12. Kesimpulan

Bab ini telah mendiskusikan metode-metode penelitian untuk penulisan tesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang lebih menitikberatkan kepada data terfokus yang mendalam. Penelitian juga menggunakan perspektif perempuan, artinya akan meneliti kedalaman perspektif perempuan dalam program Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dijalankan untuk menyelesaikan persoalan perempuan, terutama pemberian upaya pemulihan terhadap perempuan korban KDRT. Lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bekasi dan menjadi studi kasus berdasarkan pada kenyataan meskipun memiliki kedekatan wilayah dengan ibukota negara namun belum memiliki penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban KDRT sementara jumlah kasus KDRT cukup tinggi. Disamping secara geografis Kabupaten Bekasi merupakan

daerah urban yang sarat akan terjadinya pergesekan nilai dan budaya, yang sedikit banyak menjadi salah satu penyebab kerapnya perempuan menjadi sasaran kekerasan. Penentuan subjek penelitian didasarkan pada instansi penanda tangan KATMAGATRIPOL (Kesepakatan Tiga Menteri dan KAPOLRI) dan kebijakan nasional lainnya tentang pemulihan korban KDRT. Penambahan subjek penelitian dilakukan kemudian karena dirasa informasi dari informan utama belum memadai. Termasuk pula melakukan wawancara mendalam terhadap korban KDRT untuk mengetahui adakah mereka mendapatkan pemulihan. Selanjutnya instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, tape recorder, buku catatan dan alat tulis sangat membantu dalam proses penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam dan informal, observasi dan studi dokumen. Tesis ini tidak mengesampingkan isu etis penulisan ilmiah yang berkomitmen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di samping juga menjaga kerahasiaan informan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan seorang peneliti. Kesemua tahapan dalam penelitian dan penulisan tesis ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data dan informasi yang mendalam, lengkap dan menyeluruh serta tercapainya tujuan penelitian yang ingin dicapai.